

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Terkait dengan lokasi yang strategis serta kemudahan aksesibilitas, maka kegiatan perekonomian perkotaan memiliki kecenderungan dilakukan di *Central Business District* dan simpang atau ruas jalan arteri primer (Studio MPWK AP-5, 2005).

Kota Ambarawa, yang terletak pada 110°22'0,9" - 110°24'57,9" Bujur Timur dan 7°12'30,82" - 7°17'2,95" Lintang Selatan, secara geografis terletak dalam 3 kutub yaitu JOGLOSEMAR (Yogyakarta – Solo – Semarang). Sebagai kota yang dilalui jalur transportasi regional dan mempunyai aksesibilitas yang mudah maka banyak kegiatan ekonomi dilakukan di kota ini, salah satunya adalah sektor perdagangan di pasar (Salihima, 2001: 46).

Pasar Projo merupakan salah satu pasar yang cukup besar dan mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kecamatan Ambarawa. Di pasar ini, terdapat berbagai jenis dagangan antara lain gerabah, pakaian, peralatan dapur, pernik-pernik, dan bahan makanan. Kios-kios tertata rapi di setiap lantai dengan jenis dagangan yang berbeda di setiap blok-nya. Tetapi, di lantai dasar dan bagian luar pasar sering dijumpai Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada lokasi yang ditentukan. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjajakan berbagai jenis dagangan, seperti sayur-sayuran, beragam hasil tangkapan laut, bumbu-bumbuan, sembako, dan sebagainya.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis memperlihatkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang berada di Pasar Projo belum tertata rapi. Bahkan, banyak Pedagang Kaki Lima yang menggelar dagangannya di pinggir jalan dan trotoar ketika pagi hari sehingga mengganggu para pejalan kaki yang ingin berjalan di

trotoar dan lalu lintas kendaraan yang berada di sekitar pasar. Hal tersebut juga membuat pasar tidak rapi. Namun di sisi lain, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Projo secara tidak langsung memiliki peran dalam peningkatan perekonomian di daerah Ambarawa karena dapat mengurangi angka pengangguran dan menambah pendapatan daerah melalui retribusi-retribusi seperti kebersihan, parkir, dan lainnya yang akhirnya disumbangkan kepada daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, diharapkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki kesadaran untuk menggelar dagangannya dengan rapi dan tidak berada di trotoar atau bahu jalan dan sikap saling toleransi antar pedagang dan pembeli agar tidak terjadi kesemrawutan di area pasar.

Tentunya, hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpikir lebih mengenai masalah yang timbul atas keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi peraturan tersebut.

Arti dari penataan kawasan adalah merangkai atau menyusun kembali areal Pasar Projo agar lebih efisien, tertib, dan lancar untuk melakukan aktivitas transaksi jual beli. Dari uraian tersebut, penataan kawasan Pasar Projo sangat diperlukan agar roda ekonomi Kota Ambarawa berjalan dengan baik (Salihima, 2001: 57).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) bermaksud ingin mendalami lebih lanjut tentang implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa yang berkaitan dengan mata kuliah Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa. Selain itu, penulis ingin mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian dan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisa hasil penelitian.

B. Rumusan Masalah

Banyaknya PKL yang tidak rapi di sekitar Pasar Projo Kecamatan Ambarawa perlu ditata dengan memberikan masukan atau wawasan kepada mereka agar tidak mengganggu ketertiban. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa.
2. Bagaimana hambatan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa.
3. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan dalam Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa.
2. Mendeskripsikan hambatan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa.
3. Mendeskripsikan solusi yang dapat diterapkan dalam Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional pelaksanaan sebuah peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah dan instansi negara

Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima.

b. Bagi universitas

Untuk menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Peraturan Daerah khususnya tentang Pedagang Kaki Lima.